

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Obyek/Subyek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo. Seluruh desa di Kecamatan Wadaslintang sebanyak 16 desa menjadi populasi dalam penelitian ini. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh desa yang berada di Kecamatan Wadaslintang. Responden dalam penelitian ini diambil sebanyak 3-10 responden disetiap desa yang diambil dari semua aparatur desa khususnya kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan, dan kepala seksi desa.

#### **B. Jenis data**

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang didapatkan dari obyek penelitian melalui pengisian kuesioner yang dibagikan kepada responden.

#### **C. Teknik pengambilan sampel**

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *total sampling*, dimana dari total populasi pada penelitian ini yaitu 16 desa di Kecamatan Wadaslintang akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Setiap sampel desa akan diwakili oleh 3-10 aparatur desa yang berkaitan langsung dalam pengelolaan keuangan desa sebagai responden. Responden yang mewakili desa diantaranya kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan di desa dan memiliki kekuasaan atas keuangan desa, sekretaris desa koordinator

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, bendahara dengan status sebagai staf sekretariat desa yang bertugas sebagai administrasi keuangan termasuk didalamnya dalam penatausahaan keuangan desa dan dari masing-masing kepala urusan desa serta kepala seksi desa.

#### **D. Teknik pengumpulan data**

Data pada penelitian ini didapatkan dari penyebaran kuesioner kepada perwakilan dari seluruh sampel desa yang berada di Kecamatan Wadaslintang. Sampel desa yang digunakan sebanyak 16 desa dimana kuesioner akan dibagikan di masing-masing desa sebanyak 3-10 kuesioner. Jumlah kuesioner yang disebarakan sebanyak 101 kuesioner.

#### **E. Definisi operasional variabel penelitian**

##### **1. Variabel Dependen.**

###### **a. Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa**

Kinerja merupakan catatan atau laporan mengenai level prestasi dari program, atau kegiatan yang sudah dilakukan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang sudah direncanakan pada awal dalam perencanaan jangka panjang organisasi (Moeheriono, 2012). Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan desa dilakukan pengukuran

menggunakan indikator efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan pelaporan yang memadai dalam pengelolaan keuangan (Mardiasmo, 2009). Pengukuran indikator menggunakan skala likert sesuai dengan hasil pengisian kuesioner.

Pembuatan operasionalisasi variabel kinerja pengelolaan keuangan desa pada penelitian ini menggunakan item pernyataan kuesioner yang sudah pernah digunakan oleh Munti dan Fahlevi (2017) pada penelitiannya yang dilakukan di Kabupaten Bireuen Aceh. Peneliti melakukan modifikasi penggunaan kata pada salah satu item pernyataan kuesioner untuk mempermudah responden dalam memahami pernyataan.

Daftar pernyataan pada kuesioner diisi oleh responden dengan cara menjawab kolom tanggapan “Sangat Tidak Setuju” sampai dengan “Sangat Setuju” dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5, dengan keterangan sebagai berikut:

- a. SS : Sangat Setuju
- b. S : Setuju
- c. N : Netral
- d. TS : Tidak Setuju
- e. STS : Sangat Tidak Setuju

## 2. Variabel Independen.

Terdapat lima variabel Independen dalam penelitian ini, diantaranya:

### a. Kapasitas Aparatur Desa.

Kapasitas dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan dari manusia, organisasi dan masyarakat dalam mewujudkan kinerja yang baik, untuk mengidentifikasi dan meraih tujuannya, untuk perubahan apabila dibutuhkan dalam usaha keberlangsungan, pengembangan, dan dengan tujuan memajukan (Ubels *et al.*, 2010). Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang membantu kepala desa sebagai pimpinan desa dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa. Terkait dengan pengelolaan keuangan desa, kepala desa merupakan perangkat desa yang berperan langsung dalam pengelolaan keuangan desa lebih tepatnya sebagai pemegang kekuasaan atas keuangan desa.

Kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, sekretaris sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dan bendahara dengan status sebagai staf sekretariat desa yang bertugas sebagai administrasi keuangan termasuk didalamnya dalam penatausahaan keuangan desa. Kapasitas aparatur desa dapat diketahui melalui tingkat pemahaman, keterampilan, dan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan

keuangan desa (Islami, 2016). Variabel ini menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Munti dan Fahlevi (2017) yang terdiri dari enam butir pernyataan.

Daftar pernyataan pada kuesioner diisi oleh responden dengan cara menjawab kolom tanggapan “Sangat Tidak Setuju” sampai dengan “Sangat Setuju” dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5, dengan keterangan sebagai berikut:

- a. SS : Sangat Setuju
- b. S : Setuju
- c. N : Netral
- d. TS : Tidak Setuju
- e. STS : Sangat Tidak Setuju

**b. Ketaatan Regulasi.**

Ketaatan regulasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merujuk pada kepatuhan terhadap Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Terdapat empat asas dalam pengelolaan keuangan desa, diantaranya: transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin. Pengelolaan keuangan desa harus sesuai pedoman yang sudah dijelaskan secara detail dalam Permendagri di atas, pedoman pengelolaan keuangan tersebut diantaranya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Skala pengukuran yang

digunakan pada variabel ketaatan regulasi yaitu skala likert yang diambil dari pertanyaan pada kuesioner.

Daftar pernyataan pada kuesioner sebanyak tujuh butir pernyataan yang diisi oleh responden dengan cara menjawab kolom tanggapan “Sangat Tidak Setuju” sampai dengan “Sangat Setuju” dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5, dengan keterangan sebagai berikut:

- a. SS : Sangat Setuju
- b. S : Setuju
- c. N : Netral
- d. TS : Tidak Setuju
- e. STS : Sangat Tidak Setuju

**c. Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa.**

Kualitas dari pengawasan merupakan seberapa banyak kebutuhan informasi yang didapatkan mengenai tujuan dari pengawasan tersebut. Sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan desa dimana anggotanya merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis. Dengan mengetahui skedul pengawasan, standarnisasi pengawasan, dan hubungan timbal balik yang dilakukan oleh BPDesa dapat menggambarkan kualitas pengawasan BPDesa.

Variabel ini menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Munti dan Fahlevi (2017) yang terdiri dari tujuh butir pernyataan. Daftar pernyataan pada kuesioner diisi oleh responden dengan cara menjawab kolom tanggapan “Sangat Tidak Setuju” sampai dengan “Sangat Setuju” dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5, dengan keterangan sebagai berikut:

- a. SS : Sangat Setuju
- b. S : Setuju
- c. N : Netral
- d. TS : Tidak Setuju
- e. STS : Sangat Tidak Setuju

**d. Pemanfaatan Teknologi Informasi.**

Pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat yang diharapkan oleh pengguna dari teknologi informasi tersebut dalam menjalankan pekerjaannya. Dijelaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kepala desa memiliki tugas untuk memanfaatkan teknologi yang tepat guna dalam menjalankan program, prioritas, kegiatan dan kebutuhan dalam pembangunan di desa. Terkait dengan pengelolaan keuangan desa, teknologi informasi dapat dijadikan media untuk mempermudah dalam pengelolaan keuangan desa misalnya dalam penyusunan laporan keuangan maupun laporan pertanggungjawaban lainnya. Selain itu, teknologi informasi dapat

dijadikan media dalam pengambilan informasi terkait keuangan desa oleh pemerintah daerah dengan lebih mudah.

Besaran manfaat yang didapat dapat dilihat dengan tersedianya jaringan internet, jaringan internet dimanfaatkan dengan baik, aplikasi yang digunakan, laporan keuangan terkomputerisasi, dan software sesuai dengan UU (Nurillah, 2014). Variabel ini menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Nurillah (2014) yang terdiri dari enam lima pernyataan. Daftar pernyataan pada kuesioner diisi oleh responden dengan cara menjawab kolom tanggapan “Sangat Tidak Setuju” sampai dengan “Sangat Setuju” dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5, dengan keterangan sebagai berikut:

- a. SS : Sangat Setuju
- b. S : Setuju
- c. N : Netral
- d. TS : Tidak Setuju
- e. STS : Sangat Tidak Setuju

**e. Komitmen Aparatur Desa.**

Komitmen merupakan gabungan antara ukuran keyakinan seseorang dengan motivasinya (Moeheriono, 2014). *Confidence* adalah tingkat keyakinan diri seseorang atau memiliki rasa mampu dalam melaksanakan tugas dengan baik tanpa diawasi. Motivasi

adalah minat dan antusias individu dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang membantu kepala desa sebagai pimpinan desa dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa. Terkait dengan pengelolaan keuangan desa, kepala desa merupakan perangkat desa yang berperan langsung dalam pengelolaan keuangan desa lebih tepatnya sebagai pemegang kekuasaan atas keuangan desa. Kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, sekretaris sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dan bendahara dengan status sebagai staf sekretariat desa yang bertugas sebagai administrasi keuangan termasuk didalamnya dalam penatausahaan keuangan desa.

Dimensi yang digunakan untuk menentukan seberapa besar komitmen aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan keuangan desa yaitu afektif, keberlanjutan, dan normatif (Porter *et al.*, 1974). Variabel ini menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Mada *et al.* (2017) yang terdiri dari lima butir pernyataan. Daftar pernyataan pada kuesioner diisi oleh responden dengan cara menjawab kolom tanggapan “Sangat Tidak Setuju”

sampai dengan “Sangat Setuju” dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5, dengan keterangan sebagai berikut:

- a. SS : Sangat Setuju
- b. S : Setuju
- c. N : Netral
- d. TS : Tidak Setuju
- e. STS : Sangat Tidak Setuju

**f. Pendamping Desa.**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 Pasal 128 ayat 2 menyebutkan bahwa tenaga pendamping desa berasal dari perwakilan lokal desa, pendamping desa dari pemerintah kecamatan, pelaksana teknis yang bekerja di kecamatan sebagai pendamping desa, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari pendampingan desa diantaranya (Pasal 2 Permendes PDTT No.3 Tahun 2015):

- 1) Meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah desa dan pembangunan desa
- 2) Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif
- 3) Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor
- 4) Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Tercapainya tujuan dari pendampingan desa merupakan indikator kinerja pengelolaan keuangan desa yang baik. Pencapaian tersebut dapat dilihat dari pengawasan dan penilaian, teguran dan saran perbaikan, pelatihan, *transfer knowledge*, pembinaan dan pengarahan (Erawati, 2012). Variabel ini menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Erawati (2012) yang terdiri dari lima butir pernyataan. Daftar pernyataan pada kuesioner diisi oleh responden dengan cara menjawab kolom tanggapan “Sangat Tidak Setuju” sampai dengan “Sangat Setuju” dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5, dengan keterangan sebagai berikut:

- a. SS : Sangat Setuju
- b. S : Setuju
- c. N : Netral
- d. TS : Tidak Setuju
- e. STS : Sangat Tidak Setuju

## **F. Uji Kualitas Instrumen**

Uji kualitas data pada penelitian ini yaitu uji validitas data dan reliabilitas data dimana uji ini digunakan untuk mengetahui bahwa data yang akan diteliti valid dan reliabel sebelum kepada pengujian hipotesis atau uji analisis data penelitian.

### **1. Uji Validitas.**

Uji validitas pada penelitian digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data sesuai dengan

kebutuhan pengambilan data penelitian. Hasil uji menunjukkan valid menjelaskan bahwa alat ukur yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan dalam pengambilan data penelitian. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan alat bantu statistik *Bivariate Correlation Pearson*, suatu alat ukur akan dikatakan valid apabila nilai dari *Correlation Pearson* pada t hitung lebih dari t tabel dan nilai signifikansi  $< \alpha$  atau 0,05.

## **2. Uji Reliabilitas.**

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur seberapa konsisten hasil pengukuran apabila dilakukan dua kali atau lebih pengukuran. Uji reliabilitas data pada penelitian ini menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Menurut Sugiyono (2014) menjelaskan data yang reliabel apabila nilai angka *Cronbach's Alpha* dari uji reliabilitas  $\geq 0,60$ .

## **G. Uji Hipotesis dan Analisis Data**

### **1. Uji Asumsi Klasik.**

Uji hipotesis atau analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Akan tetapi, data yang akan di analisis regresi linier berganda terlebih dahulu harus memenuhi pengujian asumsi klasik dan yang digunakan pada penelitian ini diantaranya uji normalitas data, uji multikolinieritas data, dan uji heteroskedastisitas data.

#### **a. Uji Normalitas.**

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi dengan normal atau

tidak normal. Data dikatakan berdistribusi dengan normal apabila nilai dari Unstandardized Residual dari *One Kolmogorof-Smirnov (K-S)* lebih besar dari *alpha* yaitu 0,05 melalui program SPSS 19,0. Hal ini berlaku sebaliknya, data dikatakan tidak berdistribusi normal apabila nilai dari K-S lebih kecil dari 0,05.

**b. Uji Multikolinearitas.**

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat interkorelasi yang terjadi antar variabel independen pada penelitian. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factors (VIP). Apabila nilai VIP  $>10$  maka dapat dikatakan memiliki interkorelasi antar variabel independen, maka variabel tersebut harus dikeluarkan dari regresi. Begitu sebaliknya, apabila nilai VIP  $<10$  maka tidak terdapat interkorelasi antar variabel independen pada penelitian.

**c. Uji Heteroskedastisitas.**

Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana semua pengamatan pada model regresi memiliki ketidaksamaan varian dari residual. Heteroskedastisitas dapat dilihat menggunakan uji glejser. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut residual dengan variabel-variabel independen yang ada pada model penelitian. variabel independen dikatakan signifikan apabila nilai dari sig pada uji glejser lebih besar dari *alpha* atau 0,05, maka dapat dikatakan model regresi dari variabel tersebut terbebas dari

heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai uji glejser kurang dari *alpha* atau 0,05 maka dapat dikatakan model regresi tersebut terkena heteroskedastisitas.

## 2. Alat Analisis Data.

### a. Statistik Deskriptif.

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan sebenar-benarnya.

### b. Model Analisis (Analisis Regresi Linier Berganda).

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kapasitas aparatur desa, ketaatan regulasi, kualitas aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen aparatur desa, dan pendamping desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Model persamaan regresi untuk penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

X<sub>1</sub> = Kapasitas Aparatur Desa

X<sub>2</sub> = Ketaatan Regulasi

X<sub>3</sub> = Kualitas Pengawasan BPD

X<sub>4</sub> = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X<sub>5</sub> = Komitmen Aparatur Desa

X<sub>6</sub> = Pendamping Desa

$\alpha$  = Konstanta

$\epsilon$  = error

**c. Uji Nilai t (Uji Parsial).**

Uji nilai t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial pada penelitian. pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan program SPSS dan hasil uji dapat dilihat dari tabel *coefficients* pada kolom sig dan nilai koefisien regresi (B). Variabel dikatakan memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen apabila nilai koefisien regresi positif dan nilai sig  $< \alpha 0,05$  maka hipotesisnya diterima. Apabila nilai dari koefisien regresi negatif maka hipotesisnya tidak diterima.

**d. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).**

Uji koefisien determinasi  $R^2$  digunakan untuk mengetahui dan mengukur kemampuan dari model regresi dalam menjelaskan variabel dependen. Jika nilai dari uji koefisien determinasi semakin mendekati 0, maka variabel independenya semakin tidak mampu untuk menjelaskan variabel dependen. Begitu sebaliknya, apabila nilai determinan koefisien semakin mendekati 1, maka variabel independenya semakin jelas dalam menjelaskan variabel dependen.

**e. Uji Nilai F (Simultan).**

Uji nilai F atau pengujian secara simultan merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen pada penelitian. uji ini menggunakan program *SPSS*, dimana hasil uji simultan dapat dilihat

dari tabel *ANOVA* pada kolom sig. Nilai sig yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu 0,05. Apabila nilai sig  $<0,05$  maka variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen. Begitu sebaliknya, apabila nilai sig  $>0,05$  maka variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen pada penelitian.